



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

BIDANG PENGAWASAN DAN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK

Nomor SOP	SOP.16.24/DKP 1.2/IV/2024
Tanggal Pembuatan	2021
Tanggal Revisi	22 April 2024
Tanggal Efektif	22 April 2024
Disahkan Oleh	 Asraf, S.Pt, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 196810211999031002
Nama SOP	PROSEDUR OPERASI TERPADU PENCEGAHAN ILEGAL FISHING

Dasar Hukum:

1. Permenpan RB No.35 tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
2. Permenpan RB No.19 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
3. Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan atau Pembudidayaan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Yang Bukan Untuk Tujuan Komersial
9. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

Keterkaitan:

1. Kepolisian
2. TNI AL
3. Bag. Hukum Provinsi Jambi

Peringatan:

Jika tidak disusun, maka operasi terpadu akan kesulitan dilaksanakan sehingga pencapaian hasil tidak maksimal

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan pemahaman tentang Fishing ground, alat tangkap dan dokumen administrasi alat penangkapan ikan.
2. Memiliki kemampuan pemahaman tentang penerapan hukum tentang perikanan.
3. Memiliki keahlian khusus tentang penanganan pelanggaran penangkapan ikan

Perlengkapan Kinerja

1. Alat tulis Kantor, Printer, Komputer.
2. Buku Agenda
3. Armada operasi/speedboat
4. Peralatan keamanan operasi (jaket pelampung, senjata, lifebouy)
5. Personil Tim Operasi

Pencatatan dan Pendataan

Kasi Pengawasan

PROSEDUR OPERASI TERPADU PENCEGAHAN ILEGAL FISHING

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kadis	Kabid	Kasi	Ketua Tim	Bag. Hukum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permintaan Tim terpadu pencegahan dan pemberantasan illegal fishing dari Bidang PSDKP, Polres dan TNI AL							Buku Agenda	7 Hari	Tercatatnya SuratPermintaan	
2	Pengetikan draf SK tim terpadu pencegahan dan pemberantasan illegal fishing							Surat Balasan Dasar Hukum	3 Hari	Draft SK TIM	
3	Verifikasi SK dan Penandatanganan							Draft SK TIM	4 Hari	SK TIM	
4	Pendistribusian SK Kepada Anggota TIM							Buku Agenda SK TIM	1Hari	Expedisi surat keluar	
5	Mengundang tim terpadu untuk rapat penentuan jadwal operasi							Surat undangan	1 Hari	Expedisi surat keluar	
6	Pelaksaan rapat penentuan jadwal operasi							Bahan laporan pokmaswas	1 Hari	Dokumen jadwal	
7	Pembekalan tim operasi oleh ketua tim terpadu							Jumlah anggota, panduan operasi	2 Jam	Personel dan armada yang siap pakai	
8	Pemeriksaan kesiapan personel dan armada operasi oleh ketua tim terpadu							Jumlah anggota, armada, alat keselamatan dan Akomodasi	2 Jam	Personel dan armada yang siap pakai	
9	Pelaksanaan operasi terpadu oleh tim operasi							Armada dan personel	1 Hari	Hasil operasi	
10	Pendokumentasian operasi							Kamera operasi	1 Hari i	Dokumentasi operasi	
11	Pelaksanaan rapat pembahasan hasil operasi terpadu							Hasil dan dukumentasi operasi	1 Hari	Tindakan yang harus ditindaklanjuti	
12	Penyusunan laporan operasi terpad							Hasil dan dukumentasi operasi	3 Hari	Buku laporan	